

REKOMENDASI DAN KESEPAKATAN
AUDIENSI FUNGSI DAN PERAN STRATEGIS OPD DRIVER
DALAM UPAYA PERCEPATAN PUG PROVINSI DAN
KABUPATEN / KOTA KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan pembahasan audiensi fungsi dan peran strategis OPD Driver dalam upaya percepatan PUG di Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tanggal 14 November 2019, yang dihadiri oleh OPD Driver:

1. Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kabupaten Berau;
3. Kabupaten Kutai Barat;
4. Kabupaten Kutai Kertanegara;
5. Kabupaten Kutai Timur;
6. Kabupaten Mahakam Hulu;
7. Kabupaten Paser;
8. Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Kota Balikpapan;
10. Kota Bontang; dan
11. Kota Samarinda.

Beberapa catatan tentang hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh POKJA PUG dan Tim Driver Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Provinsi dan seluruh kabupaten/kota menyatakan bahwa komitmen pimpinan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PUG yang masih perlu diperkuat;
2. Percepatan pelaksanaan PUG memerlukan komitmen dan keterlibatan lebih besar dari OPD penggerak, yaitu Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah. Kondisi ini perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di OPD penggerak, pelembagaan OPD penggerak serta mekanisme koordinasi antara OPD penggerak agar lebih efektif untuk peningkatan peran dan kinerja OPD penggerak tersebut;
3. Percepatan pelaksanaan PUG sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, di dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam arah kebijakan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Peningkatan Kapasitas Pelembagaan PUG;

4. **Penyusunan anggaran responsif gender di daerah juga sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:**
 - **Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam APBD untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi pengawasan prioritas nasional yaitu evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;**
 - **Pemerintah daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dengan kebijakan pemerintah antara lain, pencapaian SDGs meliputi kesetaraan gender dengan uraian sebagai berikut: upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, Pemerintah Daerah mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE- 46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).**
5. **Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan PUG, upaya diprioritaskan pada penguatan 7 (tujuh) prasyarat kelembagaan khususnya komitmen, kebijakan, kelembagaan;**
6. **Untuk mempercepat pelaksanaan PUG perlu dikembangkan inovasi-inovasi berupa pemberian nilai tambah ICT (Aplikasi Perencanaan Penganggaran berupa dokumen GAP dan GBS) dalam proses penyusunan dokumen perencanaan penganggaran daerah, juga dengan memanfaatkan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman daerah lain yang berhasil melaksanakan PUG dengan baik, seperti Jawa Tengah (Mentor);**
7. **Dinas yang menangani PPA akan meningkatkan kerjasama dengan Lembaga masyarakat dan PSW/PSG dan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk membantu tugas dinas; antara lain memberikan nilai tambah pada pengguna pada ICT atau aplikasi proses perencanaan dan penganggaran daerah**
8. **Untuk tahun mendatang, peringkat kelembagaan PUG di tingkat Provinsi akan memasukkan peringkat Kelembagaan PUG Kab/Kota dalam penilaian capaian kerjanya. Secara bertahap akan berlaku pula untuk peringkat Kelembagaan PUG Kab/Kota dimana PUG di tingkat Desa akan diperhitungkan.**

Sesuai dengan misi Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia, sumber daya manusia dan anggaran yang efektif dan efisien melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan kesejahteraan masyarakat adalah titik permasalahan dan tujuan akhir dari PUG.

Pembelajaran pada audiensi ini akan menjadi komitmen dan titik tolak untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun mendatang, sehingga peringkat prestasi pelaksanaan PUG menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya, dalam rangka memperkuat dan meningkatkan status kelembagaan PUG, kesetaraan Gender dan peran perempuan di daerah.

Jakarta, 14 November 2019

an. Ketua Pokja PUG
Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris,



Ir. Hj. Halda Arsyad, MM
Nip. 19601028 198503 2 009

 Ketua Pokja PUG Kota Samarinda,

Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Nip.

 Ketua Pokja PUG Kota Balikpapan,

.....
Nip.

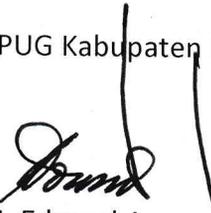
Ketua Pokja PUG
Kabupaten Penajam Paser Utara,



Drs. H. Muhammad Yusuf Basra
Nip. 19790721 200312 1 005

 Ketua Pokja PUG Kabupaten Bontang,

.....
Nip.

<p><i>gg</i> Ketua Pokja PUG Kabupaten Mahakam Ulu,</p> <p><u>Gerry Gregorius, SE, M.Si, Ak, CA</u> Nip. 19710906 200112 1 001</p>	<p>Ketua Pokja PUG Kabupaten Paser,</p> <p> <u>Muksin, SS</u> Nip. 19720807 200012 1 003</p>
<p><i>l</i> Ketua Pokja PUG Kabupaten Berau,</p> <p><u>Ir. H. Agus Wahyudi, M.M</u> Nip.19630812 199403 1 010</p>	<p>Ketua Pokja PUG Kabupaten Kutai Barat,</p> <p> <u>Ir. H. Achmad Sofyan, M.M</u> Nip.19620718 199002 1 001</p>
<p><i>AR</i> Ketua Pokja PUG Kabupaten Kutai Kartanegara,</p>	<p>Ketua Pokja PUG Kabupaten Kutai Timur,</p> <p> <u>DR. H. M. Edward Azran, SE., MS</u></p>